EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PARKIR TERPADU DI KOTA PADANG

Fathia Nefelinda
NPP. 33.0132
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: fathianefelinda@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Serly Wulandari, S.IP., M.Tr.I.P.
Email: serlywulandari@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *Parking management in the city of Padang still faces various challenges, such as a rising number of vehicles that is not matched by sufficient parking space, leading to widespread illegal parking. Furthermore, parking management still involves multiple stakeholders and has not been integrated into a single unified management body. This situation indicates that parking management policies have not yet fully succeeded in delivering effective, efficient, and equitable integrated parking services to the public.* ***Purpose:*** *This study aims to evaluate parking management policies in achieving integrated parking services in the City of Padang..* ***Method:*** *This study employs a qualitative approach using descriptive methods and analysis based on William N. Dunn's policy evaluation theory, which encompasses the dimensions of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation, with informants selected using purposive sampling, snowball sampling, and accidental sampling.* ***Result:*** *The findings indicate that the parking management policy aimed at realizing integrated parking services in the City of Padang has not yet been implemented optimally. The effectiveness dimension has not been achieved due to limited integration of parking management and a restricted number of official parking spots. The dimensions of efficiency, adequacy, and accuracy have been implemented fairly well; however, challenges remain in resource utilization, resolving parking issues, and the consistency of policy implementation. Meanwhile, the dimensions of equity and responsiveness have not been optimized, as evidenced by disparities in parking facilities between the city center and outlying areas, as well as low public satisfaction due to the continued presence of illegal parking and unofficial fees. Conclusion This study concludes that the parking management policy in realizing integrated parking services in the City of Padang has not been optimally implemented because the goal of integrating parking management under a single agency has not been achieved.*

Keywords: *Policy Evaluation; Integrated Parking Services; Parking Management.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai sehingga memicu maraknya parkir liar. Selain itu, pengelolaan parkir masih melibatkan berbagai pihak dan belum terintegrasi dalam satu badan pengelola yang terpadu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaraan perparkiran belum sepenuhnya mampu mewujudkan pelayanan parkir terpadu yang efektif, efisien, dan merata bagi masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan perparkiran dalam mewujudkan pelayanan parkir terpadu di Kota Padang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan analisis berdasarkan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, snowball sampling, dan accidental sampling. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaraan perparkiran dalam mewujudkan pelayanan parkir terpadu di Kota Padang belum berjalan optimal. Dimensi efektivitas belum tercapai karena integrasi pengelolaan parkir dan jumlah titik parkir resmi masih terbatas. Dimensi efisiensi, kecukupan, dan ketepatan telah berjalan cukup baik, namun masih ditemukan kendala dalam pemanfaatan sumber daya, penyelesaian masalah parkir, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, dimensi pemerataan dan responsivitas belum optimal yang ditandai dengan ketimpangan fasilitas parkir antara pusat dan pinggiran kota serta rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya parkir liar dan pungutan tidak resmi. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penyelenggaraan perparkiran dalam mewujudkan pelayanan parkir terpadu di Kota Padang belum terlaksana secara optimal karena tujuan integrasi pengelolaan parkir oleh badan tunggal belum tercapai.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan; Pelayanan Parkir Terpadu; Penyelenggaraan Perparkiran.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta kelancaran aktivitas perkotaan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat, kebutuhan terhadap sarana transportasi juga mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia hingga April 2025 mencapai 168,2 juta unit didominasi sepeda motor 140,9 juta unit (83,7%) dan mobil penumpang 20,5 juta unit (12,2%) (Badan Pusat Statistika Republik Indonesia, 2025). Pulau Sumatera merupakan wilayah dengan distribusi kendaraan bermotor terbesar kedua di Indonesia setelah Pulau Jawa. Pada tahun 2025, distribusi kendaraan bermotor di Pulau Sumatera mencapai 20,7% dari total kendaraan nasional. Kondisi tersebut juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah dengan jumlah kendaraan bermotor tertinggi di provinsi tersebut. Pada tahun 2024 jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang mencapai 854.326 unit dan terus meningkat hingga mencapai 944.397 unit pada tahun 2025. Selain itu, jumlah penduduk Kota Padang juga mengalami peningkatan dari 942.938 jiwa pada tahun

2023 menjadi 954.565 jiwa pada Semester I Tahun 2025 (Badan Pusat Statistika Kota Padang, 2025). Tingginya jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk Kota Padang yang terus meningkat memberikan tekanan yang besar terhadap ketersediaan lahan parkir, khususnya pada kawasan-kawasan dengan aktivitas ekonomi dan perdagangan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat okupansi parkir pada beberapa lokasi strategis bahkan telah mencapai lebih dari 100%, yang mengindikasikan bahwa sebagian kendaraan terpaksa menggunakan area tidak resmi sebagai lokasi parkir. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kapasitas jalan, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan sehingga menyebabkan munculnya titik parkir liar di wilayah Kota Padang (Taufik et al., 2023).

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Padang Tahun 2025, praktik parkir liar masih ditemukan di berbagai lokasi seperti Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Sawahan, Jalan Veteran, Jalan Pemuda, Jalan Jati, Simpang M. Djamil, serta kawasan Basko Mall. Aktivitas parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, menurunnya kenyamanan pengguna jalan, serta berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan parkir oleh pemerintah daerah. Keterbatasan lahan parkir di kawasan ini tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas dan tata ruang kota, tetapi juga menimbulkan konflik di lapangan. Konflik yang terjadi mencakup perselisihan antara petugas parkir dengan pemilik kendaraan, seperti kasus kehilangan barang milik pengguna jasa parkir di kawasan Purus Atas, hingga konflik antara petugas parkir liar dengan pihak UPTD Perparkiran Kota Padang yang enggan bekerja sama dalam proses penertiban (Amril et al., 2014).

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Padang menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai dasar hukum dalam pengelolaan dan penataan sistem perparkiran. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menata lokasi parkir, tetapi juga mewujudkan pelayanan parkir terpadu melalui integrasi pengelolaan parkir dalam satu badan pengelola yang terkoordinasi. Pelayanan parkir terpadu diharapkan mampu menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap

Penulis berfokus pada permasalahan penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang yang hingga saat ini masih belum mampu mewujudkan pelayanan parkir yang terpadu. Meskipun Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai dasar hukum pengelolaan parkir, berbagai permasalahan perparkiran masih ditemukan di lapangan, seperti tingginya okupansi parkir, keterbatasan lahan parkir resmi, maraknya praktik parkir liar, serta belum optimalnya koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan.

Salah satu permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas parkir. Peningkatan jumlah kendaraan dan penduduk tersebut berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan ruang parkir yang belum dapat diakomodasi secara optimal oleh pemerintah daerah. Keterbatasan fasilitas parkir tersebut kemudian memunculkan berbagai permasalahan turunan berupa praktik parkir liar pada sejumlah ruas jalan strategis di Kota Padang, seperti Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Sawahan, Jalan Veteran, Jalan Pemuda, Jalan Jati, hingga kawasan Basko Mall. Keberadaan parkir liar menunjukkan bahwa penyelenggaraan perparkiran belum

sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan parkir yang aman, tertib, dan terintegrasi. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya kemacetan lalu lintas, menurunnya kapasitas jalan, serta berkurangnya kualitas pelayanan publik di bidang transportasi.

Permasalahan lain terlihat pada kawasan Pasar Raya Padang, khususnya Blok II dan Blok III yang berfungsi sebagai pusat perdagangan pangan. Keterbatasan kapasitas lahan parkir menyebabkan kendaraan banyak diparkir di badan jalan dan trotoar sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas **(Fadhilah, 2025).** Selain itu, masih ditemukan konflik antara pengguna jasa parkir, juru parkir, dan pengelola parkir yang menunjukkan belum optimalnya sistem pengelolaan perparkiran yang diterapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaraan perparkiran belum berjalan secara terpadu baik dari aspek penyediaan fasilitas, pengawasan, maupun pengelolaan operasionalnya.

Meskipun berbagai studi telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian kebijakan perparkiran, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji evaluasi penyelenggaraan perparkiran dalam mewujudkan pelayanan parkir terpadu melalui integrasi badan pengelola tunggal parkir tepi jalan. Sebagian besar penelitian terdahulu berorientasi pada pengurangan parkir liar atau implementasi kebijakan semata, sedangkan kajian mengenai sejauh mana kebijakan penyelenggaraan perparkiran mampu menciptakan sistem pelayanan parkir yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan penelitian (research gap) tersebut dengan fokus pada evaluasi penyelenggaraan perparkiran dalam mewujudkan pelayanan parkir terpadu di Kota Padang, dengan tujuan konkret menganalisis sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mewujudkan integrasi pengelolaan parkir melalui badan pengelola tunggal.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena permasalahan perparkiran di Kota Padang masih ditandai oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, keterbatasan fasilitas parkir, serta maraknya parkir liar yang berdampak pada kemacetan dan menurunnya kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran belum sepenuhnya tercapai. Secara akademis, penelitian ini penting karena masih sedikit kajian yang mengevaluasi penyelenggaraan perparkiran dari perspektif pelayanan parkir terpadu, khususnya terkait integrasi pengelolaan parkir melalui badan pengelola tunggal. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada implementasi kebijakan, pengawasan, dan penertiban parkir liar. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Perhubungan dan UPTD Perparkiran, dalam memperbaiki kebijakan dan tata kelola perparkiran agar lebih efektif, tertib, dan terintegrasi. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, pemerintah daerah berisiko tidak memiliki dasar empiris yang memadai untuk mengevaluasi kebijakan yang ada, sehingga permasalahan parkir liar, kemacetan, dan ketidakteraturan pengelolaan parkir berpotensi terus berlanjut.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks kebijakan dan penyelenggaraan perparkiran. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian perparkiran memiliki variasi fokus, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan parkir di kawasan perkotaan. Parmar, Das, dan Dave mengkaji karakteristik sistem perparkiran perkotaan menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan *parking management* dan *transportation*

planning, yang berfokus pada permintaan parkir, perilaku pengguna, serta pengaruh kebijakan parkir terhadap sistem transportasi perkotaan (Parmar et al., 2020). Barter meneliti reformasi kebijakan parkir menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *parking policy typology*, yang berfokus pada berbagai model kebijakan parkir dan implementasinya dalam pengelolaan ruang perkotaan (Barter, 2015)**.** Chai, Ma, dan Zhang membahas sistem parkir dinamis menggunakan metode kuantitatif berbasis simulasi dengan pendekatan *intelligent transportation systems*, yang berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir dan mengurangi kemacetan lalu lintas (Chai et al., 2019). Selanjutnya, Ben Hassine, Kooli, dan Mraihi mengkaji penerapan tarif parkir dinamis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *multi-agent system*, yang berfokus pada optimalisasi penggunaan ruang parkir dan pengendalian kemacetan perkotaan melalui instrumen kebijakan tarif parkir (IKP Diskominfo Kota Padang, 2026)(Ben Hassine et al., 2024). Adapun Zhang, Gao, Zhang, dan Liu melakukan analisis bibliometrik dan tinjauan komprehensif mengenai manajemen serta operasional parkir menggunakan metode bibliometric analysis dengan pendekatan *parking governance and management*, yang berfokus pada perkembangan penelitian terkait kebijakan, operasional, teknologi, dan tata kelola perparkiran di berbagai negara (Zhang et al., 2026). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya dominasi kajian mengenai manajemen parkir, reformasi kebijakan parkir, penerapan teknologi perparkiran, dan pengelolaan permintaan parkir di kawasan perkotaan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dilihat dari segi konteks objek penelitian yang dilakukan, yakni evaluasi kebijakan penyelenggaraan perparkiran dalam mewujudkan pelayanan parkir terpadu di Kota Padang. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada implementasi kebijakan perparkiran, efektivitas peraturan daerah, pengawasan perparkiran, pengendalian parkir liar, serta pengelolaan parkir pada lokasi atau program tertentu. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya menelaah pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan penyelenggaraan perparkiran dengan orientasi pada terwujudnya pelayanan parkir terpadu melalui integrasi pengelolaan parkir tepi jalan oleh satu badan pengelola sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yang difokuskan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan, faktor penghambat, serta upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan parkir terpadu. Meskipun beberapa penelitian terdahulu juga menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus kajian, tujuan penelitian, dan karakteristik objek penelitian yang secara spesifik menyoroti permasalahan penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang yang ditandai dengan tingginya jumlah kendaraan bermotor, keterbatasan lahan parkir, serta masih ditemukannya praktik parkir liar di berbagai kawasan strategis.

Selain itu, pengukuran atau teori yang digunakan peneliti juga berbeda dengan sebagian penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan teori evaluasi kebijakan (Dunn, 2018).yang terdiri atas enam dimensi, yaitu efektivitas *(effectiveness)*, efisiensi *(efficiency)*, kecukupan *(adequacy*), pemerataan *(equity)*, responsivitas *(responsiveness)*, dan ketepatan *(appropriateness)*. Teori ini dipilih karena mampu mengevaluasi kebijakan secara komprehensif, tidak hanya dari aspek pencapaian tujuan kebijakan, tetapi juga dari aspek pemanfaatan sumber daya, kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan masalah, pemerataan manfaat, tingkat respons terhadap kebutuhan masyarakat, serta ketepatan kebijakan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dari aspek fokus penelitian, karakteristik objek penelitian, dan penggunaan teori

evaluasi kebijakan yang digunakan untuk menganalisis penyelenggaraan perparkiran dalam mewujudkan pelayanan parkir terpadu di Kota Padang.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai evaluasi kebijakan penyelenggaraan perparkiran dalam mewujudkan pelayanan parkir terpadu di Kota Padang berdasarkan dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Nurdin & Hartati), 2019 metode penelitian kualitatif disebut juga dengan metode baru yang dinamakan *post-positivism* karena teori ini berlandaskan pada dasar filsafat positivisme. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai evaluasi kebijakan penyelenggaraan perparkiran dalam mewujudkan pelayanan parkir terpadu di Kota Padang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara komprehensif pelaksanaan kebijakan, faktor-faktor yang menghambat, serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan perparkiran. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Menurut Effendi (2022) data primer diperoleh dari responden yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang sedang diteliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen instansi terkait, laporan kinerja, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, snowball sampling, dan accidental sampling. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang dan Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang karena memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perparkiran. Informan lainnya terdiri atas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padang, juru parkir, dan masyarakat pengguna jasa parkir yang dipilih berdasarkan keterlibatan serta pengetahuan mereka terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, observasi untuk mengamati kondisi faktual penyelenggaraan perparkiran di lapangan, serta dokumentasi untuk memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan fokus penelitian. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu guna menjamin kredibilitas data yang diperoleh. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Menurut Royani & Agusna (2025), triangulasi digunakan untuk memastikan konsistensi temuan yang didapat, mengurangi bias persepsi yang akan terjadi, dan meningkatkan kredibilitas interprestasi data sesuai dengan standar penelitian kualitatif. Adapun triangulasi ini terdiri dari triangulasi sumber dilakukan yang dengan

membandingkan pernyataan berbagai informan, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat seperti Dinas Perhubungan Kota Padang, Satpol PP Kota Padang, juru parkir, dan masyarakat pengguna jasa parkir, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengonformasi temuan wawancata melalui obervasi dan dokumentasi, sementara triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh sehingga kredibilitas data penelitian dapat terjamin.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian mengacu pada teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018) yang meliputi dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan kebijakan penyelenggaraan perparkiran, faktor-faktor penghambat yang dihadapi, serta upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan parkir terpadu di Kota Padang.

Penelitian dilaksanakan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus pada Dinas Perhubungan Kota Padang, UPTD Perparkiran, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perparkiran. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada masih ditemukannya berbagai permasalahan perparkiran, seperti keterbatasan fasilitas parkir, praktik parkir liar, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan perparkiran dalam mewujudkan pelayanan parkir terpadu. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua yaitu pada bulan Januari hingga Februari 2026 yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisiskebijakan penyelenggaraan perparkiran dalam mewujudkan pelayanan parkir terpadu di Kota Padang menggunakan teori William N. Dunn yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan terdiri dari enam dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan ((Dunn, 2018). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Efektivitas

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi efektivitas kebijakan penyelenggaraan perparkiran dalam mewujudkan pelayanan parkir terpadu di Kota Padang melalui indikator target dan tujuan, capaian program, serta pengaruh kebijakan terhadap masyarakat. Dimensi ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mewujudkan sistem pelayanan parkir yang terintegrasi melalui pengelolaan parkir oleh satu badan tunggal.

Gambar 1.
Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Kota Padang

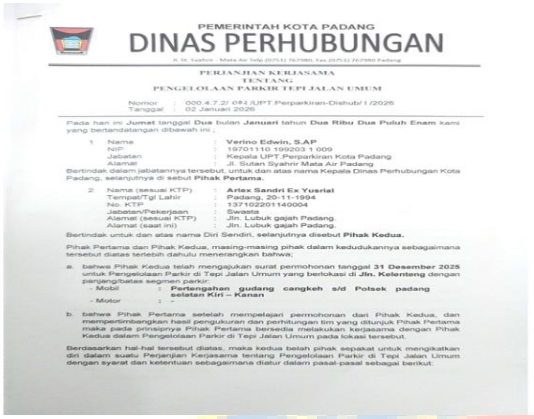

PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERHUBUNGAN

PERJANJIAN KERJASAMA
TENTANG
PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

Nomor : 000.4.7.2/ 094 /UPT.Perparkiran-Dishub/ I /2026
Tanggal : 02 Januari 2026

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Verino Edwin, S.AP**
   NIP : 197011110 199203 1 009
   Jabatan : Kepala UPT.Perparkiran Kota Padang
   Alamat : Jl. Sutan Syahrir Mata Air Padang

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, selanjutnya di sebut **Pihak Pertama.**

2. Nama (sesuai KTP) : **Artex Sandri Ex Yusrial**
   Tempat/Tgl Lahir : Padang, 20-11-1994
   No. KTP : 1371022011400004
   Jabatan/Pekerjaan : Swasta
   Alamat (sesuai KTP) : Jln. Lubuk gajah Padang.
   Alamat (saat ini) : Jln. Lubuk gajah Padang.

Bertindak untuk dan atas nama Diri Sendiri, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, masing-masing pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa;

a. bahwa Pihak Kedua telah mengajukan surat permohonan tanggal **31 Desember 2025** untuk Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi di **Jln. Kelenteng** dengan panjang/batas segmen parkir:
   - Motor : **Pertengahan gudang cangkeh s/d Polsek padang selatan Kiri – Kanan**
   - Motor : -

b. bahwa Pihak Pertama setelah mempelajari permohonan dari Pihak Kedua, dan mempertimbangkan hasil pengukuran dan perhitungan tim yang ditunjuk Pihak Pertama maka pada prinsipnya Pihak Pertama bersedia melakukan kerjasama dengan Pihak Kedua dalam Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Padang (2026)

Gambar 2.
Perbandingan titik parkir di Kota Padang

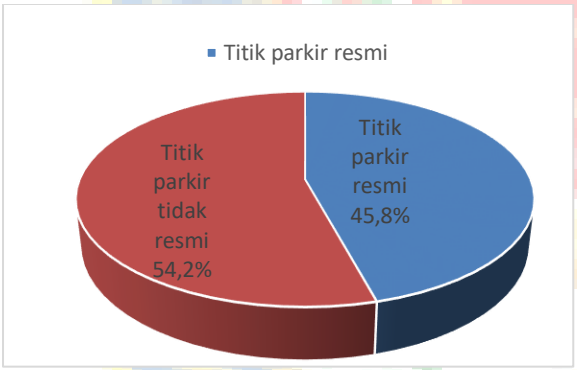

Sumber: Dioleh oleh Penulis, Dinas Perhubungan Kota Padang (2025)

Gambar 3.
Patroli Pengawasan Juru Parkir Kota Padang



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Padang (2026)

Pada **Gambar 1** dari aspek tujuan dan target berupa terwujudnya pengelolaan parkir tepi jalan oleh satu badan pengelola tunggal belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari masih beragamnya pola pengelolaan parkir di Kota Padang, dimana sebagian titik parkir masih dikelola melalui sistem kerja sama maupun pengelolaan individu. Selain itu, juru parkir yang bertugas pada sebagian besar lokasi merupakan masyarakat setempat yang direkrut dan dibina oleh UPTD Perparkiran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi pengelolaan parkir belum terlaksana secara menyeluruh.

Berdasarkan **Gambar 2** dari aspek capaian program, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perhubungan telah melaksanakan berbagai program penyelenggaraan perparkiran, seperti penataan lokasi parkir, pengawasan aktivitas parkir, serta pemungutan retribusi parkir. Namun demikian, masih ditemukan berbagai permasalahan berupa praktik parkir liar dan keterbatasan fasilitas parkir pada sejumlah kawasan strategis kota yang menghambat tercapainya tujuan pelayanan parkir terpadu.

Pada **Gambar 3** dari aspek pengaruh kebijakan, keberadaan kebijakan penyelenggaraan perparkiran telah memberikan manfaat bagi masyarakat melalui tersedianya layanan parkir yang lebih tertata dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi, dampak positif tersebut belum dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat karena masih terdapat kawasan yang mengalami kemacetan akibat parkir tidak teratur dan keterbatasan ruang parkir resmi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dimensi efektivitas kebijakan penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang telah berjalan, namun belum optimal dalam mewujudkan pelayanan parkir terpadu karena tujuan integrasi pengelolaan parkir oleh satu badan tunggal belum sepenuhnya tercapai.

3.2. Efisiensi

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi efisiensi melalui pemanfaatan sumber daya, penghematan waktu pelayanan, serta perbandingan antara biaya dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perparkiran. Dimensi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pelayanan parkir terpadu.

Gambar 1.
Juru Parkir di Jalan Permindo Kota Padang

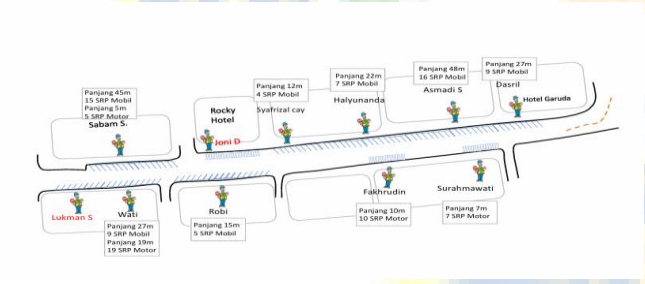

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Padang (2025)

Gambar 2.
Jenis Pola Parkir di Kota Padang

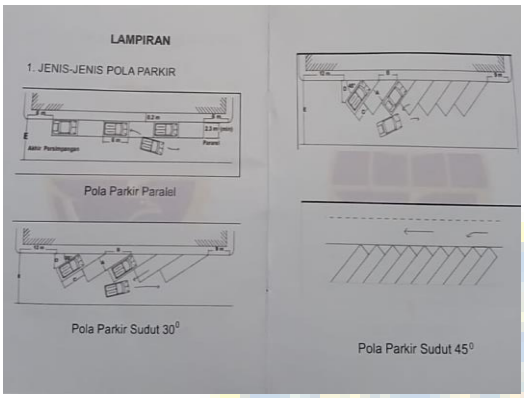

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Padang (2026)

Gambar3.
Grafik Penerimaan PAD Parkir Kota Padang

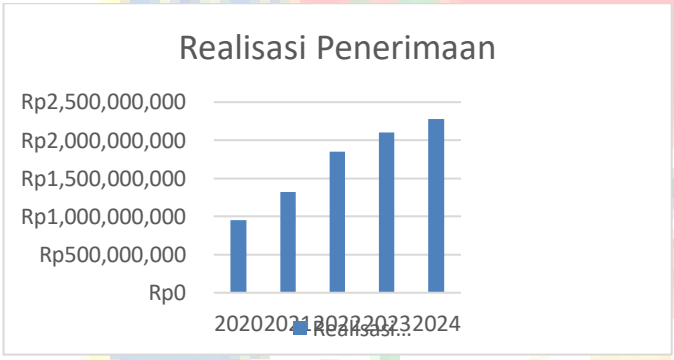

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Padang (2020-2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang digunakan dalam penyelenggaraan perparkiran masih didominasi oleh juru parkir yang berasal dari masyarakat setempat atau dikenal sebagai akamsi. Di sisi lain, pengelolaan parkir masih dilakukan melalui berbagai pola kerja sama sehingga belum mencerminkan sistem yang terintegrasi dan efisien. Selain itu, penerapan teknologi digital dalam pelayanan parkir juga belum berjalan secara optimal sehingga proses pelayanan dan pengawasan masih banyak dilakukan secara manual.

Kondisi tersebut menyebabkan potensi kebocoran pendapatan daerah dari sektor perparkiran masih mungkin terjadi dan waktu pelayanan parkir belum dapat dilakukan secara maksimal sebagaimana pelayanan berbasis digital. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta mengembangkan sistem parkir elektronik (e-parking) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dimensi efisiensi kebijakan penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang belum optimal karena pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.

3.3. Kecukupan

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi kecukupan melalui kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan perparkiran serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap fasilitas parkir yang aman, nyaman, dan memadai.

Gambar 1.

Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Padang (2026)

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan penyelenggaraan perparkiran telah mampu memberikan dasar hukum dan arah pengelolaan parkir di Kota Padang. Namun demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada, seperti maraknya parkir liar, keterbatasan lahan parkir resmi, serta tingginya kebutuhan ruang parkir akibat peningkatan jumlah kendaraan bermotor.

Selain itu, masih terdapat kawasan dengan tingkat aktivitas tinggi yang belum memiliki kapasitas parkir yang memadai sehingga kendaraan banyak menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas parkir belum terpenuhi secara optimal. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dimensi kecukupan kebijakan penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang tergolong belum memadai karena belum mampu menyelesaikan seluruh permasalahan perparkiran yang berkembang di lapangan.

3.4 Pemerataan

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi pemerataan melalui keadilan distribusi fasilitas dan pelayanan parkir antara kawasan pusat kota dengan wilayah pinggiran Kota Padang.

Gambar 1.

Perbedaan Fasilitas Parkir di Pusat Kota dengan Pinggir Kota Padang

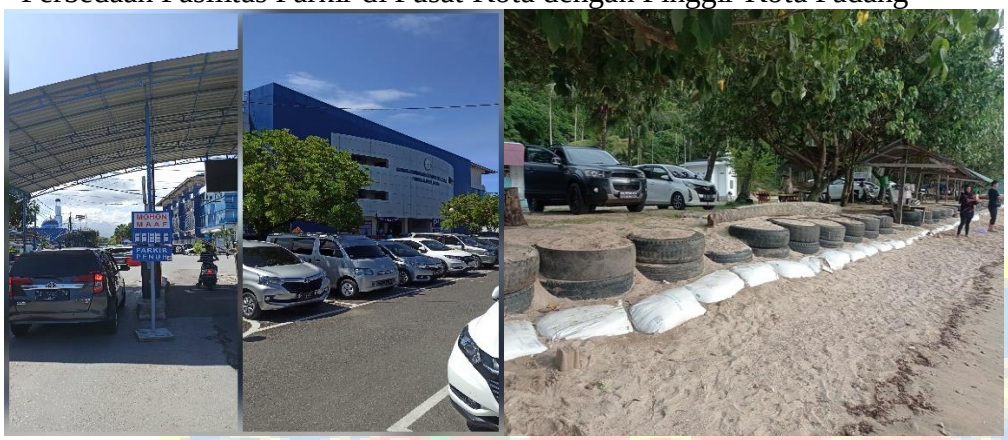

Sumber: Tribunsumbar.com (2026) ; Nativeindonesia (2026)

Gambar 2.

Perbedaan Kondisi Parkir di Pusat Kota dengan Pinggir Kota Padang



Sumber: Dokumentasi Penulis (2026)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas dan pelayanan parkir masih terkonsentrasi pada kawasan pusat kota yang memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas tinggi. Sementara itu, beberapa wilayah lainnya belum memperoleh kualitas pelayanan dan fasilitas parkir yang setara. Kondisi ini mengakibatkan adanya ketimpangan dalam akses pelayanan parkir bagi masyarakat.

Ketidakmerataan penyediaan fasilitas parkir tersebut juga berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan pada lokasi tertentu sehingga memicu munculnya praktik parkir liar dan kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan pemerataan pembangunan fasilitas parkir agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dimensi pemerataan kebijakan penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang masih perlu ditingkatkan agar distribusi fasilitas dan pelayanan parkir dapat menjangkau seluruh wilayah secara lebih merata.

3.5 Responsivitas

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi responsivitas melalui tingkat kepuasan masyarakat serta kemampuan pemerintah dalam menanggapi kebutuhan dan permasalahan yang muncul terkait pelayanan parkir.

Gambar 1.
Juru Parkir Terjaring Pungutan Liar di Kota Padang



Sumber: Katasumbar (2026)

Gambar 2.
Rapat Penyusunan Kebijakan Parkir di Kota Padang



Sumber: Posmetropadang.co.id (2026)

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi permasalahan perparkiran, seperti penertiban parkir liar dan pengawasan terhadap aktivitas perparkiran. Namun demikian, masih terdapat keluhan masyarakat terkait keamanan, kenyamanan, serta praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan pada beberapa lokasi parkir. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan pengawasan pelayanan parkir masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa parkir.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dimensi responsivitas telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama dalam aspek pengawasan dan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perparkiran.

3.6 Ketepatan

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi ketepatan melalui kesesuaian kebijakan penyelenggaraan perparkiran dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta kemampuan kebijakan dalam menjawab permasalahan perparkiran di Kota Padang.

Gambar 1.

Fasilitas Parkir Tersedia di Tempat Ibadah Kota Padang



Sumber: Dokumentasi Penulis (2026)

Gambar 2.

Kriteria Ukuran Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Kegiatan perdagangan dan perbelanjaan	500 m2 s.d. 1000 m2 luas Iantai bangunan
2.	Kegiatan Perkantoran	1.000 m2 s.d. 4000 m2 luas lantai bangunan
3.	Kegiatan Pariwisata	1441
	1. Kawasan Pariwisata	Wajib
	2. Tempat wisata	Di atas 10,0 hektar luas lahan

Sumber: Diolah dari Permenhub RI Nomor PM 17 Tahun 2021

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan penyelenggaraan perparkiran yang diterapkan Pemerintah Kota Padang pada dasarnya telah tepat karena berfokus pada penataan parkir, pengawasan, pengendalian parkir liar, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti keterbatasan fasilitas parkir, perilaku masyarakat, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan parkir. Oleh karena itu, kebijakan yang ada masih memerlukan penyempurnaan melalui penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan, pengembangan sistem parkir berbasis digital, serta penyediaan fasilitas parkir yang lebih memadai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dimensi ketepatan kebijakan penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang sudah cukup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, namun implementasinya masih memerlukan penyempurnaan agar tujuan pelayanan parkir terpadu dapat tercapai secara optimal.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaraan perparkiran dalam mewujudkan pelayanan parkir terpadu di Kota Padang belum terlaksana secara optimal. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan integrasi pengelolaan parkir melalui satu badan pengelola tunggal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut terlihat dari masih adanya berbagai pola pengelolaan parkir, keterbatasan jumlah titik parkir resmi, serta masih maraknya praktik parkir liar pada sejumlah kawasan strategis di Kota Padang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Parmar et al., (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah kendaraan tanpa diimbangi penyediaan ruang parkir yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan perparkiran, seperti tingginya tingkat okupansi parkir dan penggunaan lokasi parkir tidak resmi. Sama halnya dengan kondisi yang ditemukan di Kota Padang, peningkatan jumlah kendaraan bermotor belum diimbangi dengan ketersediaan fasilitas parkir yang memadai sehingga mendorong munculnya parkir liar dan penggunaan badan jalan sebagai ruang parkir.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Barter (2015) yang menjelaskan bahwa keberhasilan reformasi kebijakan parkir sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan yang terintegrasi dan didukung oleh tata kelola kelembagaan yang jelas. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan parkir di Kota Padang masih melibatkan berbagai pihak dengan pola kerja sama yang beragam sehingga tujuan pelayanan parkir terpadu belum dapat diwujudkan secara optimal.

Pada dimensi efisiensi, penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan parkir masih belum optimal sehingga pelayanan dan pengawasan parkir masih banyak dilakukan secara manual. Temuan ini sejalan dengan penelitian Chai et al., (2019) yang menyatakan bahwa penerapan sistem parkir berbasis teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempermudah pengawasan, dan mengurangi potensi kemacetan lalu lintas. Berbeda dengan temuan penelitian tersebut, pengelolaan parkir di Kota Padang masih menghadapi keterbatasan dalam implementasi teknologi sehingga efektivitas dan efisiensi pelayanan belum dapat dicapai secara maksimal.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Ben Hassine et al., (2024) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi serta sistem tarif yang terintegrasi dapat mengoptimalkan penggunaan ruang parkir dan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perparkiran. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan parkir di Kota Padang masih berpotensi mengalami kebocoran pendapatan akibat belum optimalnya sistem pengawasan dan digitalisasi pelayanan parkir.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa dimensi pemerataan dan responsivitas merupakan aspek yang masih memerlukan perhatian serius. Ketimpangan fasilitas parkir antara kawasan

pusat kota dan wilayah pinggiran serta masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat akibat parkir liar dan pungutan tidak resmi menunjukkan bahwa manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Zhang et al., (2026) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan tata kelola perparkiran tidak hanya ditentukan oleh aspek operasional, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang adil, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan temuan baru yang membedakannya dari penelitian terdahulu. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada manajemen parkir, reformasi kebijakan, teknologi perparkiran, dan pengendalian permintaan parkir, maka penelitian ini secara khusus mengevaluasi penyelenggaraan perparkiran dari perspektif pelayanan parkir terpadu melalui integrasi pengelolaan parkir oleh satu badan pengelola tunggal. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perparkiran tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi, tetapi juga oleh integrasi kelembagaan, pemerataan fasilitas, pemanfaatan teknologi, serta kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama penelitian, penulis menemukan beberapa faktor yang memengaruhi penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang. Faktor penghambat yang dominan adalah masih maraknya parkir liar, keterbatasan sarana dan prasarana parkir, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan parkir, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap aturan perparkiran. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelayanan parkir terpadu dan potensi kebocoran pendapatan daerah.

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung berupa adanya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 sebagai dasar hukum penyelenggaraan perparkiran, serta koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penertiban parkir. Dukungan tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan pengelolaan parkir yang lebih tertib dan terintegrasi.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang ada, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan, ketersediaan fasilitas, pemanfaatan teknologi, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perparkiran.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan penyelenggaraan perparkiran dalam mewujudkan pelayanan parkir terpadu di Kota Padang belum berjalan secara optimal. Berdasarkan dimensi evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan masih menghadapi berbagai kendala, terutama belum terwujudnya integrasi pengelolaan parkir oleh badan tunggal, terbatasnya titik parkir resmi, ketimpangan fasilitas parkir antara kawasan pusat dan pinggiran kota, serta rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perparkiran. Faktor penghambat utama meliputi sistem retribusi parkir yang masih konvensional, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan

perparkiran, dan belum optimalnya pengawasan parkir. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perhubungan dan Satpol PP meliputi penertiban parkir liar, sosialisasi kepada juru parkir, serta pendekatan dan edukasi kepada masyarakat guna mendukung terwujudnya pelayanan parkir terpadu di Kota Padang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu penelitian dan akses terhadap data operasional perparkiran secara menyeluruh menyebabkan hasil penelitian belum dapat menggambarkan seluruh dinamika penyelenggaraan perparkiran pada setiap wilayah dan kondisi yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji penyelenggaraan perparkiran dengan pendekatan yang lebih luas, baik melalui metode kuantitatif maupun metode campuran (*mixed methods*), sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan perparkiran.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang beserta jajarannya yang serta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amril, I., Abbas, A., & Prahara, S. (2014). Konflik Pengelolaan Parkir Liar di Pantai Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang. *Ilmu Sosial*, *3*(1). https://doi.org/10.22202/mamangan.v3i1.1351

Badan Pusat Statistika Kota Padang. (2025). *Kota Padang Dalam Angka 2025*. https://padangkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/a6cea883c7b5d3dd51772b6d/kota-padang-dalam-angka-2025.html

Badan Pusat Statistika Republik Indonesia. (2025). *Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia 2025*.

Barter, P. A. (2015). A parking policy typology for clearer thinking on parking reform. *International Journal of Urban Sciences*, *19*(2), 136–156. https://doi.org/10.1080/12265934.2014.927740

Ben Hassine, S., Kooli, E., & Mraihi, R. (2024). Dynamic Pricing and Route Guidance: A Multi-Agent System for Effective Parking and Traffic Management. *Transportation Research Record*, *2678*(10). https://doi.org/10.1177/03611981241231802

Chai, H., Ma, R., & Ma, R. (2019). Search for Parking: A Dynamic Parking and Route Guidance System for Efficient Parking and Traffic Management. *Journal of Intelligent Transportation Systems*, *23*(6), 5441–5556. https://doi.org/10.1080/15472450.2018.1488218

Dunn, W. N. (2018). *public policy analysis an integrated approach*. Routledge.

Effendi, L. M. (2022). Upaya Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dalam Menciptakan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Media Birokrasi*, *4*(2), 57.

IKP Diskominfo Kota Padang. (2026). Target PAD Retribusi Parkir 2026 Melonjak 58 Persen, Dishub Kota Padang Optimis Maksimalkan Potensi Baru. *Pemerintah Kota Padang (Padang.Go.Id)*. https://padang.go.id/berita/target-pad-retribusi-parkir-2026-melonjak-58-persen-dishub-kota-padang-optimis-maksimalkan-potensi-baru

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Parmar, J., Das, P., & Dave, S. M. (2020). Study on Demand and Characteristics of Parking System in Urban Areas: A Review. *Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition)*, *7*(1), 111–124. https://doi.org/10.1016/j.jtte.2019.09.003

Royani, N., & Agusna, P. (2025). Kolaborasi Antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Masyarakat Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik*, *7*(2), 109–130. https://doi.org/10.33701/jpkp.v7i2.5426

Taufik, I., Ishak, & Putra Yorizal. (2023). Studi Optimalisai Ruang Parkir Jalan Permindo Kota Padang. *Ensiklopedia*, *2*(2).

Zhang, Z., Gao, Y., Zhang, F., & Liu, W. (2026). Parking Management and Operation: A Bibliometric Analysis and Comprehensive Review. *Transport Economics and Management*, *4*, 14–37. https://doi.org/10.1016/j.team.2025.12.001